

NASIONALISME MILENIAL; MEMBACA PAHAM KEBANGSAAN GENERASI MUDA DI PAREPARE

Syamsurijal

Peneliti Balai Litbang Agama Makassar
Jalan A.P. Pettarani No. 72 Makassar
Email: bhatijalgol@gmail.com

Abstrak

Asumsi umum saat ini, nasionalisme generasi milenial dianggap mengalami kemunduran. Ikatan kebangsaan disinyalir memudar dan Pancasila sebagai dasar negara kehilangan vitalitasnya. Bersamaan dengan itu, beberapa kelompok yang anti Pancasila dan NKRI berkembang. Walau pada akhirnya dilarang, tetapi jejak pemahamannya masih membekas, khususnya bagi generasi milenial. Tetapi penelitian di Parepare terhadap kalangan milenial menunjukkan hal sebaliknya, paham kebangsaan atau nasionalisme generasi milenial di Parepare cukup tinggi. Mereka bulat menerima Pancasila sebagai Dasar Negara dan NKRI sebagai bentuk negara. Hasil penelitian ini memang menemukan masih adanya problem dalam nasionalisme kaum milenial di Parepare yakni; Mereka menerima Pancasila dan UUD 1945, tetapi tidak memahami dan mempraktikkan nilai yang dikandungnya. Di sisi lain, generasi milenial ini juga terlihat menurun pada penerimaannya terhadap kebinekaan. Tulisan ini berupaya membaca dibalik munculnya kecenderungan tersebut, sekaligus memberi beberapa tawaran-tawaran sederhana.

Kata kunci: nasionalisme, kebinekaan, nation state, milenial

PENDAHULUAN

“Sekali Tuan mulai menulis Melayu, Tuan akan cepat dapat menemukan kunci. Bahwa Tuan mahir berbahasa Belanda memang mengagumkan. Tetapi bahwa Tuan menulis Melayu, bahasa negeri Tuan sendiri, itulah tanda kecintaan Tuan pada negeri dan bangsa sendiri - - - Siapa yang mengajak bangsa-bangsa pribumi bicara kalau bukan pengarang-pengarangnya sendiri seperti Tuan”

(Pramoedya Ananta Toer, 1980: 104)

Pramoedya (1980-1985-1988) dalam novel-novelnya, khususnya tetralogi Pulau Buru, menunjukkan, nasionalisme atau rasa kebangsaan bukan semata-mata terkait persoalan politik dan kedaulatan dengan batas-batas geografis. Akan tetapi, yang lebih penting adalah, bagaimana keragaman budaya bisa terintegrasi secara budaya pula.

Salah satunya melalui bahasa. Sementara bahasa yang menjadi bahasa pengantar yang bisa mempersatukan (*lingua franca*) kita adalah bahasa Melayu. Salah satu cara mendorong nasionalisme itu, demikian Pramoedya, adalah mendorong karya-karya atau tulisan yang berbahasa Melayu.

Apa yang kita bisa petik dari pandangan Pramoedya dalam konteks nasionalisme generasi milenial saat ini? Pertama, tak lain adalah memaut mereka dalam bahasa budaya yang sama yakni, bahasa Melayu atau kita kenal saat ini sebagai bahasa Indonesia. Itu adalah *koentji*, demikian istilah Pramoedya. Meski berbahasa satu adalah salah satu *koentji* dari nasionalisme, tetapi tentu menerapkannya bukan hal mudah. Kata Daniel Dakidhae (2008), kini satu bangsa, tidak berarti satu bahasa, sebab bukankah *Jawanisasi* juga menonjol dalam bahasa kita

saat ini? Perlu perjuangan yang cukup serius untuk kembali menjadikan bahasa Indonesia sebagai sarana untuk menyatukan kebangsaan kita. Tetapi, selain soal berbahasa satu itu, saya menangkap pesan yang lebih penting dari sekadar dorongan Pramoedya untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam berkarya dalam konteks milenial ini. Pesan itu adalah pentingnya menggunakan media tulisan dalam menggelorakan semangat kebangsaan dengan bahasa gaul. Itu adalah *koentji* kedua.

Kini dalam era milenial, tulisan menemukan rumahnya yang baru melalui media sosial yang tumbuh begitu masif. Dalam rumahnya yang baru tersebut, tulisan-tulisan yang menyangkut nasionalisme harus pula menyesuaikan diri tampil lebih mudah dipahami oleh generasi milenial. Pramoedya sendiri mendorong penulisan karya sastra dalam bahasa Melayu, bukan semata karena Melayu adalah simbol persatuan dan nasionalisme tapi ia semacam *lingua franca* dari sekian bahasa di Indonesia. Bahasa ini lebih sederhana, gaul dan bisa diterima oleh semua kalangan.

Adalah hal yang menggembirakan, temuan penelitian mengenai integritas kebangsaan generasi milenial di Parepare berada pada kategori tinggi. Sudah barang tentu, hal ini menghapus kecemasan yang muncul belakangan ini, di mana generasi muda dianggap semakin pupus rasa kebangsaannya.

Penelitian Kompas dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda sebagai misal, mengindikasikan ikatan-ikatan sosial yang terbentuk di masyarakat saat ini melemah. Persatuan dan komitmen mempertahankan keutuhan wilayah mulai sirna (Kompas, 28 Oktober 2002). Hal senada juga disampaikan Arbi Sanit, sebagaimana dikutip Tatang Muttaqin

(2006), nasionalisme di kalangan kaum muda mengalami persoalan. Dengan membaca gejala dan realitas sosial yang terjadi belakangan ini, Arbi Sanit sampai pada kesimpulan; *pertama*, Ikatan kebangsaan semakin memudar. *Kedua*, Ideologi Pancasila sebagai (*collective consciousness*) kehilangan vitalitasnya sejak bergulirnya reformasi. *Ketiga*, cita-cita terwujudnya negara kebangsaan yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 pun kehilangan maknanya.

Berkebalikan dengan beberapa hasil penelitian dan pandangan ahli tadi, generasi milenial Parepare, ternyata sangat tinggi kecintaannya terhadap NKRI serta menerima secara bulat Pancasila dan UUD 1945. Walau demikian, kecemasan dari penelitian sebelumnya tidak sepenuhnya meleset. Kendati generasi milenial ini memiliki integritas kebangsaan yang tinggi, senyatanya tidak meresapi lebih dalam nilai-nilai yang dikandung dalam Pancasila, UUD 1945 maupun kebinekaan tersebut. Pancasila hanya sekadar simbol dan dipahami sebagai dasar negara, tapi seperti kata Arbi Sanit, telah kehilangan vitalitas nilai-nilainya.

Salah satu yang memengaruhi persoalan ini adalah banjirnya informasi bagi generasi milenial dengan kemudahan mengakses internet. Hanya saja, informasi itu menyajikan soal-soal kebangsaan secara banal. Mereka mudah mendapatkan informasi soal kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, dan Kebinekaan), tapi hanya sebatas informasi permukaan. Tak jarang hanya sekedar saling ejek-mengejek berupa *meme*. Banjir informasi tidak berbanding lurus dengan meningkatnya pengetahuan, soalnya informasi itu justru menyajikan realitas *post truth*. Realitas omong kosong (*bullshit*) atau hal yang bersifat subjektif-emosional yang diproduksi secara massal dan terstruktur

sehingga terkesan sebagai pengetahuan atau kebenaran.

Pada titik inilah, seperti kata Pramodya, penting menyajikan kembali pada generasi milenial tulisan yang lebih berbobot soal-soal nasionalisme. Tentu saja melalui media sosial yang mereka kenali dan dengan cara-cara yang lebih *pop culture*. Ini senada dengan dorongan Pram menggunakan bahasa Melayu, sebab bahasa Melayu adalah bahasa sederhana, tidak bertingkat-tingkat dan sangat praktis untuk digunakan. Melalui *pop culture* kita gelorakan lagi rasa kebangsaan pada kaum milenial dengan bahasa sederhana dan praktis pula, tentu dengan tetap menggunakan bahasa Indonesia.

Ben Anderson sendiri menyebutkan, sebuah bangsa tak lain adalah komunitas yang dibayangkan, tetapi memiliki kedaulatan dan terbatas (Anderson, 1986). Individu-individu menyatakan diri dan mengikatkan diri sebagai satu kesatuan, meski satu sama lain tak pernah bertemu. Kita hanya saling membayangkan satu sama lain melalui pembacaan kita terhadap diskursus di surat kabar dan kini di media sosial. Dengan kata lain, nasionalisme adalah proses untuk terus menjadi (*to be*) Indonesia. Nasionalisme bukanlah sesuatu yang terberi, ia diciptakan dan dibentuk dalam proses diskursus. Kendati Ernest Renan (1823-1842) mendefinisikan *nation* yang terkesan kekal dalam ungkapannya *a nation is a soul, a spiritual principle...a grand solidarity*, toh... pada akhirnya mengatakan *a nation is not eternal* (nasionalisme tidak abadi) (Budiawan, 2017).

Nasionalisme kaum milenial, dengan demikian, ditemu-kenali, dibentuk dan dibangun dengan cara-cara baru. Nilai-nilai yang terkandung dalam nasionalisme tersebut perlu digali ulang dan dibaca ulang oleh generasi milenial. Dengan itu kita

berharap generasi milenial bisa menangkap dan mengamalkan nilai-nilai yang dikandung Pancasila, UUD 1945 dan Prinsip Kebinekaan dengan cara-cara mereka sendiri.

Tentang Nasionalisme dan Masalahnya di Kalangan Anak Muda; Tinjauan Pustaka

Perbincangan tentang nasionalisme terlihat enteng jika kita hanya menyimak pidato-pidato para pejabat pemerintahan saat karnaval agustusan. Paling banter saat itu kita hanya disuguhkan tentang kisah kepahlawanan dan pentingnya pembangunan. Sesederhana itu!

Dalam konteks negara yang menggerakkan semangat kebangsaannya (*State Led Nationalisme*), termasuk Indonesia pada masa orde baru, nasionalisme nyaris hanya sebagai karnaval, pengibaran bendera di depan kantor dan nyanyian wajib lagu Indonesia Raya tiap perayaan tertentu. Nasionalisme banal, demikian Michael Billic (1995) mengistilalkannya, yakni nasionalisme keseharian (*daily nationalism*) yang sangat lumrah, sehingga nyaris tidak terlihat lagi sebagai sikap kecintaan terhadap tanah air. Gejala ini menjamur di negara yang telah mapan, yang tidak punya serangan dari musuh. Bagi Billic, nasionalisme seperti ini, walau banal, tetapi tetap perlu untuk menunjukkan eksistensi bangsa.

Namun, benarkah semudah itu ketika kita memperbincangkan nasionalisme? Apalagi, mengingat kini, nasionalisme di Indonesia tengah mendapat banyak ujian. Salah satunya, meminjam ungkapan Daniel Dakidae (2008); dulunya *the holy trinity* (tritunggal suci), yakni kesatuan bahasa, bangsa dan tanah air, kini bergeser menjadi *the unholy trinity*. Ketiganya, satu sama lain

saling mendepak dan saling memungungi. Amatilah bagaimana gugatan atas nama 'bangsa' terhadap Tanah Air yang bernama NKRI yang kini meruyak di mana-mana, itulah salah satu contoh '*the unholy trinity*.'

Secara umum, nasionalisme di berbagai negara telah menjadi perbincangan yang pelik sejak dekade 90-an. Banyak kalangan yang mulai meragukan keberadaan nasionalisme dari satu negara. Di antaranya adalah Kenichi Ohmae (1990). Dalam *The end of nation state* dengan sinis Kenichi telah menyatakan negara bangsa sudah tidak ada lagi. Nasionalisme telah berakhir. Dunia yang semakin terbuka akibat globalisasi telah membuat batas antara negara makin kabur. Sekat-sekat antara negara itu bahkan telah sirna dalam perdagangan dan perputaran ekonomi. Negara-negara telah menjadi bagian dari perkumpulan blok ekonomi misalnya G16, APEC, AFTA atau AEC (*Asean Economic Community*).

Tidak lama berselang Julia Kristeva's melontarkan konsep yang nyaris sama. Ia menyebut adanya *Nation without nationalism*. Lela Ghandi yang mengutip pandangan Kristeva kemudian menjelaskan *Nation without nationalism* ini sebagai masyarakat yang masih terikat secara formal dalam satu negara, tapi mengingkari ikatan nasionalismenya dengan negara tersebut (Leela Ghandi, 1998).

Di Indonesia sendiri persoalan ini menguar pasca reformasi. Beberapa daerah muncul memperjuangkan identitas lokal. Daerah-daerah tersebut tidak ingin lagi terkungkung dalam *state led nationalism* yang sangat integralistik. Daerah-daerah melakukan gugatan melalui corong nasionalisme etnik. Beberapa di antaranya malah mengeras menjadi gerakan yang semakin menjauh dari NKRI, misalnya Papua Merdeka dan Gerakan Aceh Merdeka.

Sebagian lainnya, hanya ingin mengganti identitas pemerintahan yang diseragamkan oleh orde baru, misalnya Aceh ingin mengganti Desa dengan Nagari, Toraja menginginkan desanya berubah menjadi *Lembang atau Penannia*. Di tempat yang lain merebak isu daerah Syariat Islam atau Kota Injili. Apapun bentuk gerakan itu, mau yang moderat atau pun yang sangat keras, tak lain adalah pukulan berat terhadap nasionalisme di Indonesia.

Fenomena ini menarik perhatian beberapa kalangan. Beberapa penelitian dilakukan. Di antaranya, penelitian Litbang Kompas. Penelitian tersebut menemukan, ikatan-ikatan sosial yang terbentuk di masyarakat saat ini melemah. Persatuan dan komitmen mempertahankan keutuhan wilayah mulai sirna. Tetapi, yang lebih mengkhawatirkan, gejala tersebut terjadi di kalangan anak muda (Kompas, 28 Oktober 2002).

Bappenas, yang dilakukan Tatan Mutaqqin dan beberapa sejawatnya, juga turun lapangan melakukan penelitian mengenai persoalan nasionalisme ini. Penelitian ini berupaya mengungkap faktor yang bisa menguatkan nasionalisme tersebut, serta bagaimana seharusnya nasionalisme bisa tetap kokoh di Indonesia, khususnya di kalangan muda. Ujung dari temuan mereka adalah, rekomendasi untuk merumuskan satu bentuk nasionalisme baru (Tatan, 2006)

Penelitian Balai Litbang Agama Makassar sendiri menemukan beberapa fakta-fakta yang bersinggungan dengan persoalan kebangsaan bagi kalangan muda dalam beberapa serial penelitiannya yaitu: Pergeseran Paham Keagamaan Mahasiswa (2016), Respons Siswa terhadap Radikalisme agama (2017), Radikalisme Kaum Muda Makassar (2017) serta Paham Keagamaan Mahasiswa di Indonesia Timur (2009).

Dalam beberapa penelitian tersebut ditemukan gejala-gejala penolakan terhadap keragaman dan adanya keinginan mencari alternatif bentuk negara yang berbeda.

Sementara itu, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI dalam kurun waktu 2015-2018, telah melakukan penelitian tentang bagaimana posisi nasionalisme kalangan milenial dengan kehadiran teknologi informasi dan komunikasi 4.0. Hasil penelitian menunjukkan, kehadiran teknologi itu menciptakan ruang publik baru, tetapi sekaligus membentuk pula komunitas *on line* yang mendasarkan dirinya pada ikatan primordialisme. Thung Ju Lan, yang mengomandoi penelitian ini menyebutkan; media sosial malah seakan-akan membelah masyarakat dalam kotak-kotak. Sering kali hal ini malah menjadi pembuka pintu untuk menyebar kebencian (lipi.go.id).

Keseluruhan hasil penelitian di atas mengonfirmasikan ada masalah dalam nasionalisme kita, khususnya di kalangan anak muda. Pertanyaannya, apakah dengan demikian nasionalisme di kalangan muda sudah mulai luntur, atau perlu pembacaan baru atas nasionalisme mereka? Mari kita mendarasnya kembali dengan melihat fenomena nasionalisme di kalangan milenial Parepare.

Parepare; Kebinekaan, Kebangsaan, & Anak Muda

Parepare adalah salah satu kota niaga di Sulawesi-selatan dengan masyarakat yang heterogen. Daerah ini cukup representatif menggambarkan kebinekaan itu sendiri. Dari sisi agama misalnya, semua agama; Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha, serta Konghucu, ada di kota ini. Kendati secara nominal persentase umat Islam sangat menonjol karena berada di atas 90 % , tetapi

agama lain bisa hidup dengan cukup damai di daerah ini.

Segala macam etnis pun hadir di Kota Parepare. Bugis dan Makassar adalah yang paling besar. Namun suku lain seperti Jawa, Sasak, Minangkabau dan juga Tionghoa ada di kota ini. Etnis Tionghoa di Parepare adalah etnis yang cukup besar. Mereka telah ada sejak lama. Tidak ada yang tahu pasti, kapan mereka mulai berdiam di Parepare. Kebanyakan mereka adalah pedagang yang sudah cukup berbaur dengan etnis lain, khususnya Bugis. Etnis Tionghoa ini bahkan sangat fasih berbahasa Bugis. A. Makmur (2006) menceritakan bagaimana rapatnya pergaulan orang Tionghoa dan etnis Bugis, sehingga mereka punya kebiasaan kongkow bareng, sambil berbicara keras dan tertawa-tawa. Sayangnya beberapa tahun terakhir, hal ini sudah langka dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Parepare.

Dalam penelitian Syamsurijal, *Politik Diferensiasi; Mengubah Paradigma Pengakuan Bagi Kaum Minoritas Konghucu di Indonesia* (2013), disebutkan bahwa etnis Tionghoa ini bergaul cukup rapat pula dengan penganut Islam. Salah satu ulama karismatik, yaitu AGH Ambo Dalle, sangat disukai oleh orang-orang Tionghoa. AGH Ambo Dalle sering datang ke acara mereka, sebaliknya mereka pun dengan senang hati memberi sumbangan pembangunan pesantren DDI.

Hal ini menunjukkan dalam waktu yang cukup panjang, tidak ada persoalan dengan soal penerimaan kebinekaan di tengah-tengah masyarakat Parepare. Dengan kata lain, salah satu syarat agar *nation state* bisa tegak dengan kokoh yakni menerima kebinekaan, telah berjalan di Parepare. Tetapi tahun-tahun terakhir ini, rupanya relasi antara umat beragama tidak semesra dulu lagi. Kendati tidak ada persoalan yang

berarti, tetapi segregasi identitas terasa semakin menguat. Pengaruh gerakan politik di daerah lain yang melibatkan soal agama dan etnisitas ikut mewarnai cara pandang masyarakat, khususnya generasi yang aktif menggunakan media sosial atau lazim disebut dengan generasi milenial.

Kelompok Islam puritan, termasuk HTI, juga memiliki pengaruh. Paling tidak di kalangan mahasiswa kampus. Meski tidak signifikan, namun wacana anti nasionalisme dari kelompok ini mulai menguar. Tentu saja kokohnya nasionalisme yang sudah tertanam sejak dulu kala di daerah ini tidak goyah dengan paham yang diusung kelompok baru ini. Apalagi, setelah organisasi ini tidak diakui keberadaannya di Indonesia, perlahan pengaruhnya di kampus-kampus mulai memudar, meski tidak bisa dikatakan hilang sama sekali.

Hanya saja, membayangkan paham kebangsaan generasi belakangan (milenial) ini tidak bisa sama dengan generasi sebelumnya, yaitu generasi Z, generasi *baby boomer*, apalagi kalangan muda yang merintis nasionalisme di Indonesia. Kalau dulu nasionalisme terkesan membara (*hot nasionalism*), kini generasi milenial memiliki alternatif lain dalam melihat soal kebangsaan. Mereka tidak lagi mendapatkan informasi tunggal mengenai cinta tanah air, Pancasila, UUD 1945 dan Kebinekaan. Sementara generasi milenial di Parepare, jika merujuk pada usia yang ditetapkan United States Census Bureau, adalah yang paling banyak jumlahnya. Mereka yang lahir di antara 1982-2000, demikian rentang usia kaum milenial menurut lembaga tadi, berjumlah sekitar 49.000-an dari 142 097 jumlah penduduk Parepare (BPS Parepare, 2018). Aktivitas kelompok ini di ruang publik dengan demikian, akan menentukan seperti apa warna kebangsaan masyarakat

Parepare di masa-masa yang akan datang.

Integritas Kebangsaan Milenial Parepare yang Menggembirakan

Tulisan ini sejatinya mendasarkan diri pada hasil penelitian Integritas Kebangsaan Kaum Milenial di Indonesia Timur. Penelitian tersebut dilakukan dengan *mix methode*, yakni penggabungan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Tulisan ini sendiri lebih banyak mengurai dari perspektif kualitatifnya. Beberapa angka kuantitatif dimunculkan, hanya mencuplik dari satu daerah yaitu Parepare. Angka-angka statistik itu ditampilkan hanya sejauh untuk menguatkan perspektif kualitatifnya.

Berdasarkan dari angka indeks integritas kebangsaan di Parepare, maka bisa dikatakan bahwa generasi milenial di daerah ini memiliki integritas kebangsaan yang sangat bagus. Demikian yang ditunjukkan oleh nilai pada indeks kebangsaan di daerah ini, yang berada pada titik 3,32. Angka ini menunjukkan indeks yang sangat tinggi.

Dari tiga variabel penelitian, yaitu integritas pada NKRI, integritas pada Pancasila, UUD 1945 dan simbol negara, serta integritas pada kebinekaan; dua yang pertama berada pada indeks yang sangat tinggi yaitu berada pada angka 3,38 dan 3,48. Sementara variabel terakhir yaitu integritas pada kebinekaan hanya berada pada indeks yang tinggi dengan nilai 3,14.

Di beberapa indikator yang menunjukkan komitmen pada NKRI, Pancasila dan UUD 1945, terlihat bahwa generasi *milenial* Parepare bulat menerima dan memiliki komitmen yang kuat. Yang paling tinggi, bahkan nyaris menyentuh angka tertinggi adalah menerima Pancasila sebagai dasar negara. Pada indikator tersebut responden nyaris seluruhnya menjawab sangat setuju. Dengan demikian penerimaan

Pancasila sendiri bagi kalangan *milenial* di Parepare tidak bermasalah.

Demikian halnya dalam soal kebanggaan menjadi bagian dari warga negara Indonesia, rata-rata generasi *milenial* merasakan kebanggaan yang sangat tinggi menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Munculnya beberapa paham yang ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan ingin mengubah bentuk negara kesatuan republik Indonesia, tampaknya tidak memengaruhi kalangan *milenial* di daerah ini.

Kendati tinggi pada variabel menerima Pancasila dan negara NKRI sebagai bentuk negara, tetapi terlihat mulai menurun pada variabel yang ketiga, yaitu menerima dan menghargai keragaman. Indeks penerimaan mereka pada NKRI adalah 3,38, menerima Pancasila 3,43 dan kebinekaan pada angka 3,14. Ketiga angka tersebut masih menunjukkan indeks yang tinggi, tetapi penurunan pada soal menerima kebinekaan menunjukkan ada yang *missing* antara penerimaan Pancasila dan NKRI dan mengaplikasikan nilai-nilai yang dikandung oleh keduanya, yaitu kebinekaan itu sendiri.

Kala Generasi Milenial Memahami Nasionalisme

Seperti telah diungkapkan sebelumnya, hasil penelitian tentang integritas kebangsaan kalangan milenial, ternyata cukup menggembarakan. Yang menjadi kekhawatiran selama ini bahwa kalangan milenial mulai luntur rasa nasionalismenya, pupus cinta tanah airnya dan lenyap rasa kebangsaannya, tidak sepenuhnya terbukti. Setidaknya begitulah jika melihat angka indeks Integritas Kebangsaan Kaum Milenial di Parepare yang berada pada angka 3,32 (sangat tinggi).

Sebagaimana kita mafhum, akhir-akhir ini nasionalisme sendiri didera berbagai

persoalan yang cukup dahsyat. Ada daerah yang meminta merdeka, ada yang ingin hukumnya berdasarkan agama tertentu dan sebagainya. Tidak hanya di negara kita, nasionalisme yang selama ini dianggap sebagai kontainer kebangsaan dari satu negara juga tengah bermasalah di berbagai belahan dunia. Peristiwa negara-negara Balkan adalah salah satu contohnya. Negara-negara di kawasan tersebut, akhirnya pecah tercerai-berai, karena ikatan nasionalisme tidak mampu lagi menampung identitas kebangsaan yang ada di tiap negara bagian.

Kenichi Ohmae (1990) dalam *The end of nation state* dengan sinis telah mengumandangkan matinya nasionalisme. Tidak ada lagi nation state, sebab dunia makin terbuka. Sekat-sekat antara negara telah diterabas oleh aturan perdagangan dan perputaran ekonomi global. Negara yang berbeda menjadi satu dalam blok ekonomi. Kini ada G16, APEC, AFTA atau AEC (*Asean Economic Community*). Ikatan yang terbangun bukan lagi hanya sebatas ikatan sebagai satu negara, tetapi ikatan karena adanya kesamaan orientasi ekonomi. Dalam situasi demikian maka pernyataan yang mengaitkan antara cinta tanah air dengan membeli produk dalam negeri menjadi tidak relevan lagi.

Julia Kristeva melontarkan suara yang sama. Ia menyebut satu istilah yang mencengangkan; *Nation without nationalism*. Lela Ghandi yang mengutip pandangan Kristeva ini lantas menjelaskan *Nation without nationalism* ini sebagai masyarakat yang masih terikat secara formal dalam satu negara, tapi mengingkari ikatan nasionalismenya dengan negara tersebut. Contoh soal ini telah banyak, salah satunya adalah *Quebeck* di Kanada (Leela Gandhi, 1998).

Untuk kasus Indonesia, *nation without nationalism* ini pun mulai membayangi kita. Muncul beberapa kelompok masyarakat yang secara hukum masih menjadi bagian dari NKRI, tetapi menolak bentuk negara, tidak menerima dasar negaranya, dan anti terhadap nasionalisme itu sendiri. Kelompok HTI adalah contoh yang paling nyata dalam hal ini. Memang pada akhirnya pemerintah mengambil tindakan tegas dengan membubarkan organisasi tersebut melalui SK Menteri Hukum dan HAM No. AHU-30.AH.01.08/2017 dengan mencabut Badan Hukum organisasi tersebut. Acuannya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2/2017.

Kendati organisasi ini telah dibubarkan, jejaknya masih tertinggal hingga kini. Gagasan kelompok yang anti NKRI ini mulai merasuk di kalangan anak muda atau generasi milenial. Kelompok ini dalam ruang terbatas mampu memengaruhi kalangan muda melalui media sosial sekaligus secara militan mengader pelajar-pelajar SMA dan Mahasiswa. Hal ini bisa dilihat dalam penelitian Litbang Agama Makassar tentang Pergeseran Paham Keagamaan Mahasiswa (2016), Respons Siswa terhadap Radikalisme agama (2017), Radikalisme Kaum Muda Makassar (2017) serta Paham Keagamaan Mahasiswa di Indonesia Timur (2009). Selain itu, kendati telah dibubarkan, tetapi mereka tetap saja melakukan gerakan senyap di bawah tanah untuk menyebarkan ide-idenya sampai hari ini.

Namun rupanya persoalan kebangsaan dan rasa nasionalisme seturut yang dikatakan oleh Shabir Ahmed dan Abid Karim (1997) bukanlah sesuatu yang tetap. Ikatan kebangsaan, demikian Ahmed dan Abid Karim yang lahir dari naluri untuk mempertahankan diri, bukan sebagai sesuatu yang bersifat permanen. Ia akan muncul jika

masyarakat satu bangsa merasakan satu ancaman dan bisa pudar bila ancaman itu hilang. Sebaliknya rasa kebangsaan yang kadarnya menurun, bisa kembali bergelora jika merasa ada ancaman dari luar atau terus-menerus dibangun kesadarannya bahwa kita sedang berhadapan dengan kelompok yang akan merongrong eksistensi negara.

Meningkatnya komitmen kebangsaan dari kaum milenial Parepare ini salah satunya karena adanya isu mengenai infiltrasi asing di media sosial dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat Indonesia. Kuatnya penetrasi kelompok HTI yang mewacanakan perubahan bentuk negara di media sosial, ternyata juga mendorong bangkitnya kesadaran dari kelompok milenial ini akan ancaman terhadap ikatan kebangsaan mereka. Saya menyebut ini sebagai wacana arus balik. Saat kelompok tertentu melakukan penetrasi yang masif melalui media sosial, yang terjadi adalah kesadaran kebangsaan karena merasakan adanya ancaman atas eksistensi negara mereka.

Fachruddin Syahrul mahasiswa IAIN Parepare menceritakan bagaimana teman-temannya sesama mahasiswa menjadi bersemangat berdiskusi soal kebangsaan saat Pancasila diserang oleh kelompok-kelompok HTI di media sosial. Rasa kebangsaan tumbuh, walau kebanyakan di antara mereka juga tidak memahami nilai-nilai yang dikandung oleh Pancasila. "Kita melawan di media sosial untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, walau dengan argumen seadanya." Begitu kata ketua dari Lembaga Bela Negara IAIN Parepare ini.

Kalangan milenial sendiri adalah kelompok masyarakat yang merupakan pengguna media sosial aktif. *Alvara Research* yang melakukan penelitian

terhadap kaum milenial ini menyatakan, salah satu perilaku kaum milenial ini adalah kecanduan internet. Delapan dari sepuluh kaum milenial sangat aktif menggunakan internet. Penggunaan internet itu di antaranya untuk *searching* (*googling*) berbagai berita, untuk bermedia sosial dan juga digunakan bermain *game*.

Dari menggunakan internet secara aktif ini, mereka mendapatkan informasi yang akhirnya mereka simpulkan sebagai ancaman bagi eksistensi negara Indonesia. Kalangan milenial Parepare, seperti yang saya tanyakan ke beberapa generasi milenial mengakui bahwa mereka mendapat informasi mengenai terancamnya Indonesia dari serbuan asing dan juga kelompok yang ingin mengubah dasar negara ini. Pada prinsipnya mereka tidak peduli pada persoalan politik, tapi jika hal itu sudah dirasa mengancam eksistensi mereka sebagai warga, termasuk akan mengganggu mereka nantinya dalam bekerja atau harapan untuk bekerja, maka tentunya akan memunculkan keinginan untuk membela bangsa ini (Wawancara Sulaeman & Arafah, 28 Juli 2018, di Parepare).

Rupanya perasaan terancam atas *resources* ekonomi kalangan milenial ini ikut memengaruhi muncul rasa kebangsaan tersebut. Kalangan milenial bisa tidak peduli dengan soal ideologi dan politik yang menjadi bagian dari nasionalisme, tapi dalam hal terkait dengan pekerjaan dan *resources* ekonomi, mereka sangat acuh. Walau mereka mayoritas masih pelajar dan mahasiswa, harapan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan sangat kuat. Ekonomi adalah salah satu faktor yang bersifat rasional instrumental yang ikut memengaruhi rasa nasionalisme mereka.

Penelitian Tatan Mutaqin dkk (2006), menyebutkan, salah satu yang mendorong

orang-orang bersedia berada dalam satu ikatan kebangsaan karena pertimbangan ekonomi tersebut. Apakah kebutuhan dasar saya terpenuhi ketika berada dalam ikatan kebangsaan itu atau tidak? Kalau hal ini tidak terpenuhi, maka ikatan kebangsaan itu bisa menjadi longgar. Tetapi di saat yang sama, jika ada penetrasi asing atau ideologi asing yang dianggap akan mengganggu kepentingan ekonomi tersebut melalui ancaman terhadap ikatan kebangsaan, maka justru akan memperkuat ikatan itu. Orang-orang akan solid, bukan karena semata mempertahankan ideologinya, tapi juga menyangkut soal mempertahankan *resources* ekonomi mereka dari ancaman luar.

Hal ini selaras dengan pandangan Shabir Ahmed dan Abid Karim soal tumbuhnya rasa kebangsaan, karena punya perasaan bersama akan adanya ancaman seperti yang telah diudarkan sebelumnya. Di luar itu faktor-faktor lain yang bisa memengaruhi tumbuh kembangnya rasa kebangsaan ini adalah maraknya kembali Pendidikan Kebangsaan. Prosesnya berlangsung melalui sekolah, media, rumah ibadah dan juga melalui media sosial.

Sejak munculnya kelompok yang ingin mengubah Pancasila sebagai dasar negara dan menolak keberadaan NKRI, kampus-kampus, kalangan agamawan dan berbagai institusi kenegaraan aktif kembali menggelorakan semangat kebangsaan ini. Di Parepare sendiri institusi Bela Negara muncul di tiap kampus. Aparat kecamatan bekerja sama dengan ABRI turun ke sekolah-sekolah untuk menguatkan rasa cinta tanah air melalui program Bela Negara. Hal-hal ini juga memperkuat diskursif soal kebangsaan kita di kalangan milenial.

Yang tak kalah menariknya adalah penguatan rasa kebangsaan ini melalui medium agama. Ini adalah salah satu model

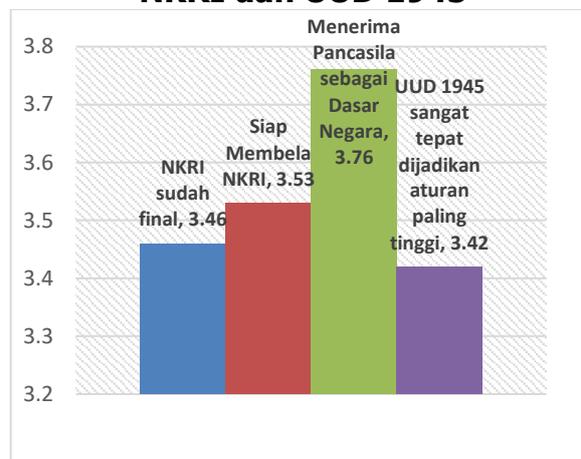
yang cukup efektif untuk menguatkan diskursif mengenai kebangsaan. Penelitian Tatan Mutaqqin (2006) dengan judul Membangun Nasionalisme Baru menggambarkan keterkaitan antara agama dengan kebangsaan ini. Dalam penelitian itu disimpulkan semakin tinggi wawasan keagamaannya maka semakin tinggi rasa kebangsaannya. Hanya saja patut kita garis bawahi, bahwa tentu hanya pemahaman agama yang inklusif sajalah yang dapat menerima konsep kebangsaan kita yang berbasis keragaman suku dan agama. Sementara pemahaman yang eksklusif akan sulit menerima hal tersebut.

Pada hari-hari terakhir ini, di tengah munculnya penolakan atas nasionalisme berbasis agama, muncul kelompok agama dan tokoh-tokohnya yang menggelorakan rasa nasionalisme berbasis agama pula. Organisasi semacam NU dan Muhammadiyah giat mengampanyekan penguatan kebangsaan berdasarkan agama. Untuk hal ini NU bahkan mempopulerkan ucapan KH Wahab Hasbullah, *Hubbul wathan minal iman*. Lagu *Ya Laal Wathan* yang berisi seruan membela negara dan cinta tanah air, serta syair-syair Guru Tua tentang Merah Putih didengungkan berulang-ulang di media sosial, maupun di media-media *on line*.

Tak cukup memengaruhi kaum milenial di dunia *medsos*. Institusi agama ini turun langsung mengader kalangan anak muda untuk mencintai tanah air. Hal ini misalnya aktif dilakukan oleh Anshor di Parepare, yang merupakan organisasi kepemudaan di NU.

Dengan ulasan di atas dapat kita mengerti mengapa kalangan milenial di Parepare nyaris seluruhnya secara bulat menerima Pancasila, NKRI dan UUD 1945. Hal itu bisa kita lihat dalam grafik di bawah ini :

Grafik 1
Penerimaan terhadap Pancasila, NKRI dan UUD 1945



Sumber data diolah, 2018

Lantas bagaimana kalangan milenial ini memaknai kebangsaan, nasionalisme penerimaan Pancasila, NKRI dan UUD 1945?

Merujuk Ernest Renan, rasa kebangsaan atau nasionalisme muncul di antaranya karena faktor kesamaan cita-cita, azas, ideologi, pengalaman dan pemahaman kesejarahan, etnis, agama dan ekonomi. Kesamaan tersebut mengikat satu masyarakat agar menjadi satu bagian dari nation-state (Budiawan, 2017). Tetapi dalam konteks kaum milenial, nasionalisme yang dibangun semacam ini, kurang relevan. Di samping karena ideologi saat ini semakin kabur, bahkan oleh Daniel Bell disebut; *“The end of ideologi”*, juga karena kaum milenial juga tidak memedulikan hal-hal yang berbau ideologis dan politis.

Sementara terkait dengan pemahaman kesejarahan tentang latar belakang berdirinya bangsa Indonesia, kaum milenial juga telah kehilangan jejak. Seperti diakui Parman, Lurah Bukit Harapan, generasi milenial tidak mengenal lagi sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Di sekolah sejarah perjuangan bangsa tidak lagi diajarkan,

sementara buku cerita atau novel yang menggambarkan perjuangan mendirikan bangsa ini sudah menjadi barang langka. Dengan demikian memahami nasionalisme bagi kaum milenial Parepare tidak lagi terkait dengan sejarah perjuangan bangsa.

Dari uraian di atas jelas bahwa kesadaran kebangsaan itu muncul tidak terkait sama sekali dengan persoalan ideologis maupun kesejarahan. Kesadaran kebangsaan kalangan milenial ini muncul akibat seringnya persoalan ini muncul dalam media sosial.

Selain itu pemahaman mereka terhadap Pancasila, UUD 1945 atau NKRI masih sebatas pemahaman umum. Pancasila hanya dipahami sebagai dasar negara dan harus diterima serta dijaga sebaik-baiknya. Pemahaman ini lebih banyak bersifat *common sense*. Begitu pun soal UUD 1945 mereka hanya memahaminya sebagai aturan tertinggi dalam bernegara yang juga harus diterima.

Hanya saja para kaum milenial Parepare ini sejatinya tidak memahami nilai-nilai yang dikandung oleh Pancasila dan UUD 1945. Hal ini diakui oleh beberapa tokoh-tokoh pemuda dan mahasiswa. Mereka seacara jujur menyatakan bahwa Pancasila dan UUD 1945 hanya dipahami sebatas dasar dan aturan dalam bernegara tapi tidak memahami nilai yang dikandungnya (Wawancara Amran & Diana, tokoh mahasiswa IAIN; 30 Juli 2018). Muhammad Nurjani, Camat Soreang, menganggap hal ini karena mereka sudah tidak mendapatkan lagi pelajaran tentang Pancasila di sekolah.

Muhammad Nurjani memberikan contoh bagaimana kelompok masyarakat yang dikategorikan kelompok milenial ini sangat susah diajak untuk bergotong royong dalam mengerjakan hal yang terkait dengan

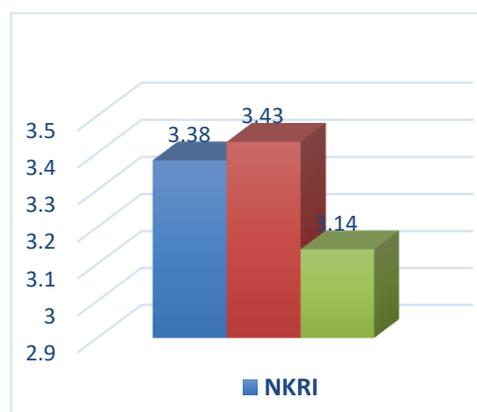
kepentingan umum. Padahal gotong royong adalah salah satu nilai yang dikandung oleh Pancasila.

“Mereka menerima Pancasila sebagai dasar negara, tapi sebenarnya tidak paham nilai yang dikandungnya apalagi melaksanakannya” Tegas komandan Koramil Soreang, Kapten Basri, menambahkan pendapat Nurjani.

Bulat Menerima NKRI & Pancasila tetapi Canggung dalam Kebinekaan

Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa kaum milenial di Parepare bulat menerima NKRI dan Pancasila, tetapi mulai menurun saat terkait dengan kebinekaan.

Grafik 2
Perbandingan antara Variabel



Sumber Data diolah, 2018

Data ini semakin menguatkan pandangan sebelumnya, bahwa cara generasi milenial di Parepare memahami Pancasila, UUD 1945 masih sebatas melihatnya sebagai simbol negara yang perlu dipertahankan dan dijaga, namun kandungan dari Pancasila dan UUD 1945 belum begitu dipahami.

Salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah menerima kebinekaan. Seperti kita mafhum Indonesia adalah negara yang majemuk. Terdiri atas beragam suku dan agama. Realitas itu tidak hanya harus diterima, namun juga harus dikelola dan siap

berinteraksi di dalamnya. Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai yang mengajarkan soal penerimaan terhadap keragaman tersebut. Termasuk di dalamnya, bagaimana kita menerima orang yang berbeda agama dan siap berinteraksi dengannya. Begitu pun UUD 1945, aturan tertinggi ini telah memberi jaminan untuk perbedaan keyakinan dan suku memiliki posisi yang sama di hadapan negara. Dalam posisi ini, generasi milenial Parepare rupanya belum menyerap nilai tersebut dengan baik. Hal yang lain yang makin menguatkan pendapat ini adalah pandangan dari beberapa pimpinan lokal. Menurut para pemimpin lokal ini, generasi milenial saat ini, setidaknya demikian yang terlihat pada kecamatan Bacukiki dan Soreang kehilangan sikap guyub dan gotong royong (Wawancara Camat Soreang, Camat Bacukiki, dan Lurah Bukit Harapan; 1 Agustus 2018, di Parepare).

Boleh jadi, hal ini juga merupakan ciri khas kaum milenial yang tidak terlalu peduli memperbincangkan hal yang rumit atau sesuatu yang dianggap bersifat ideologi dan politik. Mereka hanya memperbincangkan hal itu pada tataran permukaan sebagai tema diskusi santai atau ajang perang *meme*. Dalam konteks demikian maka tentu saja diskusi generasi milenial di *medsos* tidak akan menyentuh pada nilai-nilai yang dikandung oleh Pancasila, UUD 1945 dan kebinekaan.

Pancasila, UUD 1945 dan kebinekaan, dengan demikian menjadi penting dijadikan tema perbincangan umum. Sudah barang tentu dalam konteks generasi milenial ini; Pancasila, UUD 1945 dan kebinekaan, harus disuguhkan dalam konteks yang mereka senangi. Nilai-nilai yang dikandung dalam Pancasila dan UUD 1945 harus dibicarakan dalam kemasan *pop culture*.

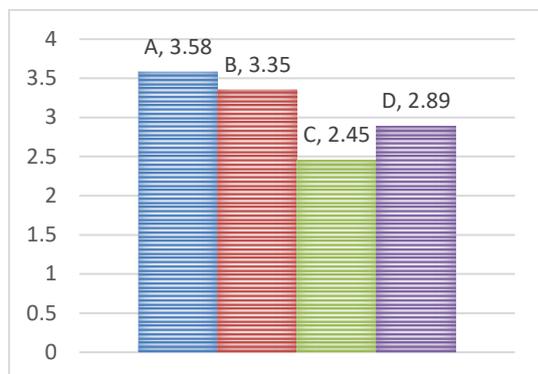
Tentu bukan hanya nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang didesiminasi dengan cara-cara *pop culture*, namun juga secara umum rasa kebangsaan atau nasionalisme kita. Sampai di sini saya tertarik dengan cara komentator sepak bola dalam komentarnya yang dengan lantang menyebut siapa kita....? Indonesia...! Komentar ini kemudian muncul di media sosial dalam bentuk meme atau komik bergambar yang begitu antusias diterima oleh kalangan milenial.

Media sosial, dengan demikian, menjadi sarana efektif untuk membentuk nasionalisme tersebut. Ben Anderson dalam *Imagined Communities* pernah menyebut bahwa salah satu yang membuat seseorang *aware* mengenai informasi di dalam dan di luar negeri adalah berita atau informasi yang semakin meluber. Saat penelitiannya itu berlangsung (awal 80-an) yang menonjol masih surat kabar. Melalui informasi itu nasionalisme juga dipengaruhi pertumbuhannya. Dengan dan melalui surat kabar orang mendefinisikan dirinya dan hubungannya dengan yang lain. Inilah dasar dari tumbuhnya nasionalisme. Kata Ben;

Newspapers made it possible for rapidly growing numbers of people to think about themselves, and relate themselves to others in profoundly new ways (Surat kabar memungkinkan orang-orang yang tumbuh dengan cepat untuk berpikir tentang diri mereka sendiri, dan menghubungkan diri mereka dengan orang lain dengan cara yang sangat baru)(Ben anderson, 1986 : 120).

Mengenai kuatnya pengaruh media sosial ini terhadap menentukan siap kita dan bagaimana berhubungan dengan yang lain, bisa kita liat pada perbandingan indikator pada variabel integritas kebinekaan.

Grafik 3
Perbandingan Indikator pada
variabel Kebinekaan



Sumber data diolah 2018

Pada grafik di atas memuat indikator yang terkait dengan; Pertama (A) penerimaan terhadap keragaman. Kedua (B); Hidup bersama dengan yang beda agama. Ketiga (C); Pemimpin beda agama. Keempat (D); Pemimpin beda suku.

Dua grafik pertama soal penerimaan secara umum terhadap keragaman dan kesediaan hidup bersama masih terlihat sangat tinggi. Namun ketika menyangkut soal kesediaan dipimpin oleh yang agama dan suku lain, terlihat menurun.

Jamilah, seorang akademisi IAIN Parepare melihat hal itu sebagai kewajaran, mengingat paham keragaman yang dianut oleh mayoritas masyarakat Parepare memang demikian, yaitu bisa menerima perbedaan, tapi untuk memberikan jabatan strategis pada orang yang berbeda agama atau suku, masih belum dimungkinkan. “Itulah yang diajarkan di sekolah dan perguruan tinggi di sini,” tegas Ibu dosen ini.

Di luar yang disampaikan ibu dosen tadi, dangkalnya penerimaan generasi milenial terhadap nasionalisme dan munculnya penolakan terhadap agama lain disebabkan karena informasi dari media sosial yang mereka peroleh lebih banyak

berwujud *post truth*. *Post truth* ini adalah informasi yang tidak berbasis pada kebenaran fakta, tapi lebih menekankan emosional informatif (Yasir, 2018). Selama berita itu sesuai dengan kecenderungan emosi kita, tidak peduli benar atau salah kita akan melennya mentah-mentah. Evan Davis, seperti dikutip Yasir (2018), menyentil perilaku itu dengan menyebut begini; *in practice we evidently are quite happy to believe untruths*. Ringkasnya, dalam *post truth*, kata Yasir Alimi (2018), *facts are futile* (fakta sia-sia belaka).

Dalam diskusi saya dengan beberapa tokoh pemuda dan responden secara langsung maupun di grup WA yang saya buat, terlihat bahwa diskursus nasionalisme yang mereka terima kebanyakan dalam model *post truth* ini. Misalnya isu soal tenaga kerja Cina yang telah masuk ke beberapa wilayah di Indonesia, inilah yang beberapa kali *dishare* di grup atau menjadi topik diskusi kami. Yang tersentuh kemudian, adalah emosi dan sentimen anti Cina.

Beberapa responden yang kembali diwawancarai menyatakan bahwa penolakan terhadap orang berbeda agama untuk jadi pemimpin justru didapatkan dari media sosial. “Hal ini terjadi khususnya saat terjadi Pilkada di Jakarta, informasi mengenai haramnya memilih pemimpin beda agama sangat deras masuk ke WA atau *facebook* kami” Ungkap salah seorang responden.

Sayangnya, isu itu lebih banyak bernuansa sentimen etnis dan kepentingan politik tertentu tapi dikemas sedemikian rupa sebagai kebenaran dan pengetahuan. Di satu sisi membakar semangat nasionalisme mereka, namun bersamaan dengan itu melahirkan sentimen terhadap etnis dan agama tertentu. Hal ini melahirkan nasionalisme yang sangat kuat basisnya pada

etnis tertentu yang dianggap pribumi dan menyingkirkan yang lain yang dianggap non pribumi. Bahkan, dari sini juga muncul identifikasi agama pribumi dan yang non pribumi. Anehnya yang pribumi itu misalnya Islam, sementara Kristen dianggap non pribumi, Hindu, Budha dan Konghucu tidak masuk kategori salah satunya. Inilah kerancuan yang terbangun dalam nalar kaum milenial akibat pengaruh *post truth* tadi. Nasionalisme yang dibangun melalui media sosial yang lebih banyak berwujud informasi banal.

Hal ini bisa memunculkan sektarianisme, yaitu nasionalisme yang menganggap etnis atau agamanya yang paling kampiun. Lalu menuju pada ghettoisme, yaitu hilangnya kepercayaan pada etnis atau agama lain, atas dasar superioritas atau sebaliknya merasa inferior. Puncaknya akan berakhir menjadi nasionalisme yang tribalisme, yaitu hanya percaya dan mengandalkan persatuan internal kelompoknya di saat yang sama tidak mau menerima keberadaan yang lain.

Nasionalisme dalam beberapa bentuk di atas, akan mudah terjatuh menjadi ultra nasionalisme, yaitu paham yang mengagungkan bangsa atau etnis sendiri dan menghina bahkan membenci etnis dan bangsa lain. Model yang seperti inilah yang tidak diterima dalam Islam dan dikritik oleh Ibn Khaldun sebagai bentuk *Ashabiyah*.

PENUTUP

Pada akhirnya bisa disimpulkan bahwa integritas kebangsaan di Parepare sangat tinggi. Hanya saja posisi sangat tinggi itu hanya sebatas penerimaan normatif dari Pancasila, UUD 1945 dan Kebinekaan. Generasi milenial ini belum memahami secara detail dan dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, dan Kebinekaan.

Integritas kebangsaan semacam ini dipengaruhi beberapa hal. *Pertama*; paham kebangsaan tersebut mereka terima sebagai satu hal yang bersifat *common sense* (pengetahuan umum di masyarakat). *Kedua*; Paham Kebangsaan Generasi Milenial ini dipengaruhi pula informasi dari internet dan media sosial. *Ketiga*; Nasionalisme yang diperoleh dari media sosial maupun internet penjelasannya kurang menitik dalam menggali nilai-nilai yang terkandung dalam nasionalisme itu sendiri. Bahkan dalam banyak kasus, di media sosial, informasi soal nasionalisme itu lebih banyak bersifat *post truth*. Realitas omong kosong (*bullshit*) atau hal yang bersifat subjektif-emosional yang diproduksi secara massal dan terstruktur sehingga terkesan sebagai pengetahuan atau kebenaran. Pada akhirnya, Pancasila, UUD, NKRI, dan Kebinekaan hanya sebatas simbol yang perlu dijaga dan dipertahankan, namun tidak memahami apalagi mempraktikkan nilai yang dikandungnya. *Keempat*; di lain sisi, pelajaran yang lebih dalam mengenai nasionalisme (wawasan kebangsaan, Pancasila, UUD 1945 dan Kebinekaan) tidak lagi ditemukan di sekolah-sekolah. Bahan bacaan terkait itu pun sudah jarang ditemukan.

Salah satu jalan keluarnya adalah dengan mengarusutamakan (*mainstreaming*) nilai-nilai kebangsaan (nasionalisme) dalam hal ini Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Kebinekaan pada generasi milenial. Sudah barang tentu metodenya tidak mengulangi cara-cara indoktrinasi orde baru, melalui penataran atau pelajaran yang membosankan di kelas. *Mainstreaming* ini bisa dilakukan dengan cara-cara *pop culture*. Pembuatan film pendek, komik, meme, dengan memanfaatkan media sosial (*facebook*, *youtube*, *instagram*, dan lainnya).

Boleh saja, *pengarus-utamaan* ini juga

menyentuh lingkungan sekolah, tetapi berupa tulisan ringan bergaya *pop culture* atau novel-novel berbahasa ringan dengan tema kebangsaan. Dari sanalah kalangan milenial tersebut dibangun rasa nasionalisme dan pengetahuan tentang nasionalisme itu sendiri. Dengan cara itu, mungkin kita telah mempraktikkan saran dari Pramudya untuk menggunakan bahasa yang lebih sederhana, praktis dan mudah dikenali oleh kalangan milenial. Itulah jembatan kita untuk mengenalkan nasionalisme kepada generasi ini. Bila tidak demikian, boleh jadi nasionalisme tinggal menjadi cerita masa lalu bagi generasi melek teknologi informasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Shabir dan Abid Karim. *Akar Nasionalisme di Dunia Islam*. Bangil: Al-Izzah Press, 1997
- Alimi, Yasir. *Mediatisasi Agama, Post Truth dan Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: LKiS, 2018
- Ananta Toer, Pramoedya. *Bumi Manusia*. Jakarta: Hasta Mitra, 1980
- _____. *Anak Semua Bangsa*. Jakarta: Hasta Mitra, 1980
- _____. *Jejak Langkah*. Jakarta: Hasta Mitra, 1985
- _____. *Rumah Kaca*. Jakarta: Hasta Mitra, 1988
- Anderson, Benedict R. O'G. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso, 1986
- Budiawan, *Nasion & Nasionalisme*. Yogyakarta: Ombak, 2017
- Billig, Michael. *Banal Nationalism*. London: Sage, 1995
- Dhakidae, Daniel. "Memahami Rasa Kebangsaan dan Menyimak Bangsa sebagai Komunitas-komunitas Terbayang" dalam Ben Anderson, *Komunitas komunitas Terbayang*. Yogyakarta: INSIST, 2008
- Gandhi, Leela, *Postcolonial Theory. A Critical Introduction* .NSW: Allen Unwin, 1998
- Makmur. A. *Parepare Lebih Indah dari Monte Carlo*. Parepare: YPGPI, 2006
- Muttaqin, Tatang Dkk, *Membangun Nasionalisme Baru; Bingkai Kebangsaan Indonesia Kontemporer*. Jakarta : Bappenas, 2006
- Ohmae, Kenichi, *The End of the Nation State; The Rise of Regional Economic. Borderless world*, 1990
- Syamsurijal, *Politik Diferensiasi; Mengubah Paradigma Pengakuan Bagi Kaum Minoritas Konghucu di Indonesia*. Makassar: Litbang Agama Makassar, 2013
- Tim Peneliti Litbang Agama Makassar, *Paham Keagamaan Mahasiswa di Indonesia Timur*. Makassar : Litbang Agama Makassar, 2009
- _____. *Pergeseran Paham Keagamaan Mahasiswa di KTI*, Makassar : Litbang Agama Makassar, 2016
- _____. *Respons Siswa terhadap Radikalisme Agama (2017)*, Makassar : Litbang Agama Makassar, 2017
- _____. *Radikalisme Kaum Muda Makassar*. Makassar : Litbang Agama Makassar, 2017
- _____. *Integritas Kebangsaan Kaum Milenial di Indonesia Timur*, 2018